

ABSTRAK

KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

Di beberapa wilayah di Indonesia, pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan belum dapat berjalan secara efektif karena mengalami beberapa permasalahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelembagaan, peran *stakeholders*, dan strategi pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan terlibat (*participatory observation*), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Pengambilan sampel wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 12 orang informan kunci. Hasil penelitian diperoleh bahwa BBM subsidi jenis solar dapat diakses pembeliannya lebih mudah dibandingkan dengan BBM Peralite tersedia pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang dikelola PT Pertamina dan PT (Aneka Kimia Raya (AKR). Namun akses pembelian solar pun masih terdapat kendala persyaratan administrasi berupa dokumen kapal. *Stakeholder* utama dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah nelayan, SPBN Pertamina, SPBN AKR, dan PT Pertamina Patra Niaga, sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (KSOP), dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas adalah pendukung implementasi kebijakan. *Stakeholders* kunci adalah BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina dan SPBN PT AKR, yang sangat berperan terhadap keberhasilan pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa peta strategi terletak pada kuadran I yaitu mendukung strategi agresif. Strategi yang dapat dilakukan pada pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah menggunakan kekuatan (*strengths*) untuk meraih peluang (*opportunity*). DKP Kota Bandar Lampung sudah sangat perlu membangun kemitraan untuk membuka akses pelayanan bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

Kata kunci : BBM subsidi, kebijakan, nelayan, *stakeholder*, SPBN

ABSTRACT

INSTITUTIONS AND STRATEGIES FOR DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL FOR FISHERMEN IN KANGKUNG VILLAGE, BUMI WARAS DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

In several regions in Indonesia, the distribution of fuel oil for fishermen has not been able to run effectively because it has experienced several problems. The purpose of this study is to analyze the institutions, roles of stakeholders, and strategies for distributing fuel subsidies for fishermen in Kangkung Village, Bumi Waras District, Bandar Lampung City. Data collection used in-depth interviews, participant observation, Focus Group Discussions, and documentation studies. Sampling of in-depth interviews used purposive sampling techniques for 12 key informants. The results of the study showed that the diesel fuel type of subsidized fuel can be accessed more easily compared to pertalite fuel available at special fuel station for fishermen (SPBN) managed by PT Pertamina and PT AKR. However, access to purchasing diesel fuel still has administrative requirements in the form of ship documents. The main stakeholders in the distribution of fuel subsidies for fishermen are fishermen, SPBN Pertamina, SPBN AKR, and PT Pertamina Patra Niaga, while Mina Jaya Cooperative (KUD), Department of Marine Affairs and Fisheries of Bandar Lampung City (DKP Kota Bandar Lampung), Harbormaster's Office and Class I Port Authority (KSOP), and Downstream Regulatory Agency Committee Oil and Fuel (BPH) are supporters of policy implementation. The key stakeholders are BPH, PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina and SPBN PT. AKR. SWOT analysis shows that the strategy map is in quadrant I, which supports an aggressive strategy. DKP Bandar Lampung City really needs to build partnerships to open access to services for fishermen through fuel stations.

Key words : subsidized fuel, policy, fishermen, stakeholders, fuel station